

Anggota DPR-RI asal Aceh Minta Direksi BSI Dicotot dan Reformasi Perbankan

Category: Aceh

written by Redaksi | 12/05/2023



[Orinews.id](https://orinews.id)| **Jakarta** – Imbas dari errornya Layanan transaksi Bank Syariah Indonesia (BSI) di ATM dan BSI Mobile hampir 1 pekan, yakni sejak Senin (8/5/2023), Anggota DPR RI asal Aceh, Rafly Kande minta direksi BSI di copot dan kementerian BUMN agar lakukan reformasi sistem perbankan.

“Kita minta menteri BUMN Eric Thohir agar jabatan utama BSI dicopot semua, mulai Aceh sampai Nasional. Agar menempatkan orang-orang yang tepat dalam melakukan reformasi sistem perbankan kedepan,” ujar Rafly Kande di Jakarta, Jumat (12/05/2023).

Menurut anggota Komisi VI itu, persoalan kelalaian management BSI, membuat layanan perbankan menjadi error. Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di tingkat

nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama dan pejabat Pemerintah Aceh.

Kondisi yang ironi, dengan status BSI sebagai Bank Operasional Tingkat 1 di Aceh dan per juni 2022 BSI mengumumkan laba bersih mencapai Rp 2,13 triliun, tumbuh 41,31 persen (yoy).

Menurutnya, permasalahan ini bisa lebih cepat teratasi apabila pemerintah turut membantu menyelesaikannya. Sebab, ia menilai pemerintah memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sehingga, pencarian solusi akan lebih efektif.

Melihat sejarah BSI lahir karena adanya Qanun LKS Aceh, no.11 tahun 2018. Kemudian terbentuknya Merger dari bank HIMBARA seperti BNI, BRI, Mandiri untuk mendirikan BSI.

Senada anggota DPR-RI Rafly Kande, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri Kamis (11/05/2023) mengakui pihaknya sudah melakukan musyawarah di lembaga tersebut untuk meninjau ulang qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan merevisi agar bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh.

“Revisi Qanun LKS itu suatu yang mendesak mengingat sejak tidak beroperasinya bank konvensional banyak pengusaha hingga warga mengeluh terkait layanan Bank Syariah di Aceh,” ungkap Saiful Bahri (Pon Yaya)

Sejak diberlakukannya aturan Qanun Aceh No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, perbankan yang diperbolehkan beroperasi di Aceh hanya bank syariah. []